

**FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN DI
INDONESIA**



Skripsi Oleh:

DEVA KESUMA NINGTYAS

01021281823099

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

“FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA ”

Disusun Oleh

Nama : Deva Kesuma Ningtyas

NIM : 01021281823099

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

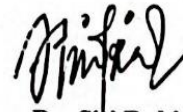
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 13 April 2023



Ketua: Dr. Siti Rohima, S.E., M. Si

NIP. 196903142014092001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Disusun oleh

Nama : Deva Kesuma Ningtyas

NIM : 01021281823099

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Juli 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 21 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

Dosen Penguji



Dr. Azwardi, S.E., M.Si

NIP.196805181993031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 19730406201012001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 22-9-2023
FAKULTAS EKONOMI UINWRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Deva Kesuma Ningtyas

NIM : 01021281823099

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 17 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 21 September 2023

Pembuat Pernyataan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 22-9-2023
FAKULTAS EKONOMI UINSR



Deva Kesuma Ningtyas

NIM. 01021281823099

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Penentu Faktor Kemiskinan di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan berbagai hambatan. Akan tetapi berkat bantuan, dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap melalui tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, 21 September 2023



Deva Kesuma Ningtyas

NIM 01021281823099

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi berkat bantuan, dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta limpahan karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan bagi penulis untuk memperoleh gelar pendidikan Strata Satu (S1)
2. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si sebagai ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran serta telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan arahan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, Papa H. Muhammad Rusman S.H, M.Si dan Mama Hj. Herlianah SST serta kedua adik saya Nanda dan Fadel yang telah mendoakan, memberikan perhatian kasih sayang dan juga dukungan sehingga diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan proses penulisan skripsi ini sampai dengan akhir.

ABSTRAK

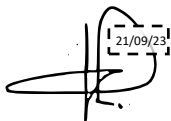
FAKTOR PENENTU TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh :
Deva Kesuma Ningtyas; Siti Rohima

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan (probabilitas > 0.05). Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan secara parsial berpengaruh negatif (probabilitas < 0.05) dan koefisien sebesar $-0,163707$. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk perbaikan peraturan, penetapan target anggaran agar lebih efisien.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Jumlah Penduduk Miskin, Kemiskinan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

Pembimbing



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP 196903142014092001

ABSTRACT

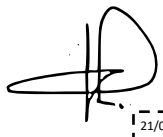
DETERMINING FACTORS OF POVERTY LEVELS IN INDONESIA

By:
Deva Kesuma Ningtyas; Siti Rohima

This research aims to analyze the relationship between government spending in the economic sector, government spending in the education sector and the number of poor people in the previous year on poverty in Indonesia. The type of data used in this research is secondary data. Data source obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Multiple linear regression analysis technique. Based on the results, it was found that government spending in the economic sector had an insignificant negative effect (probability > 0.05). Government spending on education has a partial negative effect (probability < 0.05) and the coefficient is -0.163707. Meanwhile, the number of poor people in the previous year has a significant influence on poverty. Further analysis is needed to improve regulations and set budget targets to make them more efficient.

Keywords: *Government Expenditures in the Economic Sector, Government Expenditures in the Education Sector, Number of Poor People, Poverty*

Acknowledge by,
Head of Development Economics Department



21/09/23

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

Advisor,



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP 196903142014092001

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Deva Kesuma Ningtyas
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Juli 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun II, Desa Kemang Indah, Kec. Mesuji Raya
Kab. OKI, Sumatera Selatan
Alamat Email : devaksm18@gmail.com

Pendidikan Formal

- 2006-2012 : SD Negeri 23 Palembang
- 2012-2015 : SMP Negeri 1 Palembang
- 2015-2018 : SMA Negeri 1 Palembang
- 2018-2023 : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi

- Staff Dana dan Usaha Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (IMEPA)
- Anggota Relawan Anak Sumatera Selatan (RASS)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Kemiskinan Ragnar Nurkse.....	13
2.1.2 Teori Pengeluaran.....	15
2.1.3 <i>Expenditure Programs for the Poor</i> (Program Pengeluaran untuk Kemiskinan)	19
2.2 Definisi dan Konsep	24
2.2.1 Kemiskinan.....	24
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah	27
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Pikir.....	31

2.5	Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Ruang Lingkup.....	33
3.2	Jenis dan Sumber Data	33
3.3	Teknik Analisis Data.....	33
3.3.1	Hasil Estimasi Model	35
3.3.2	Asumsi Klasik	37
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Hasil Penelitian	42
4.1.1	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia.....	42
4.1.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia.....	45
4.1.3	Hasil Estimasi Persamaan Regresi	46
4.1.4	Uji Asumsi Klasik	50
4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Kemiskinan.....	54
4.2.2	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan.....	55
4.2.3	Hubungan Jumlah Penduduk Miskin Tahun Sebelum dan Kemiskinan.....	57
BAB V PENUTUP		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)	9
Tabel 2. 1 Ekspenditures on Major Need-Tested Programs (2004).....	20
Tabel 4. 1 Hasil Estimasi Regresi	47
Tabel 4. 2 Uji Multikolineritas.....	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa).....	4
Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan Berdasarkan Penawaran.....	14
Gambar 2. 2 Lingkaran Setan Kemiskinan Berdasarkan Permintaan	15
Gambar 2. 3 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	17
Gambar 2. 4 Budget Constraint for Leisure-Income Choice.....	21
Gambar 2. 5 Budget Constraint Under TANF	22
Gambar 2. 6 Labor Supply Decision Under TANF	22
Gambar 2. 7 Kerangka Pikir	32
Gambar 4. 1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah).....	43
Gambar 4. 2 Belanja Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah)	44
Gambar 4. 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (ribu jiwa).....	45
Gambar 4. 4 Uji Normalitas	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	65
Lampiran 2 Hasil Regresi	66
Lampiran 3 Uji Normalitas	66
Lampiran 4 Uji Multikolinieritas	67
Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas.....	67
Lampiran 6 Uji Autokorelasi	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena krisis global merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perekonomian Indonesia yang lemah. Hal ini terjadi karena menurunnya neraca pembayaran, terjadi tekanan nilai tukar rupiah, dan akibat dari laju inflasi (Adhisasmita, 2005). Pengaruh lain dari terjadinya krisis global, yaitu angka kemiskinan yang semakin meningkat.

Kemiskinan ialah satu masalah rumit yang menjadi pusat perhatian pemerintah hampir seluruh negara. Kemiskinan tidak dialami oleh negara yang sedang berkembang dan cenderung terbelakang saja, tetapi dirasakan juga oleh negara maju. Negara negara maju biasanya mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik pun tetap memiliki resiko mengalami kemiskinan jika warga negara maupun pemerintah tidak mampu mencukupi keperluan dasar (sandang dan pangan). (Abilawa & Amin, 2016)

Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintahan Indonesia telah berusaha mengatasi masalah kemiskinan walaupun hingga saat ini hasilnya masih cukup jauh dari memuaskan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya: kurangnya akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan serta pengaruh dari jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya.

Pada pertengahan tahun 1960-an, kondisi perekonomian Indonesia memasuki keadaan yang sangat buruk karena terjadi kekacauan politik yang dipicu

oleh Presiden Soekarno. Sejak tahun 1970 an hingga awal 1990 an, setelah melakukan berbagai upaya dalam mengentas kemiskinan, Indonesia telah berhasil secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun pada tahun 1997-1998 krisis ekonomi mulai melanda Indonesia yang menyebabkan keterpurukan ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah membuat beragam kerangka kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih terarah, yakni melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan.

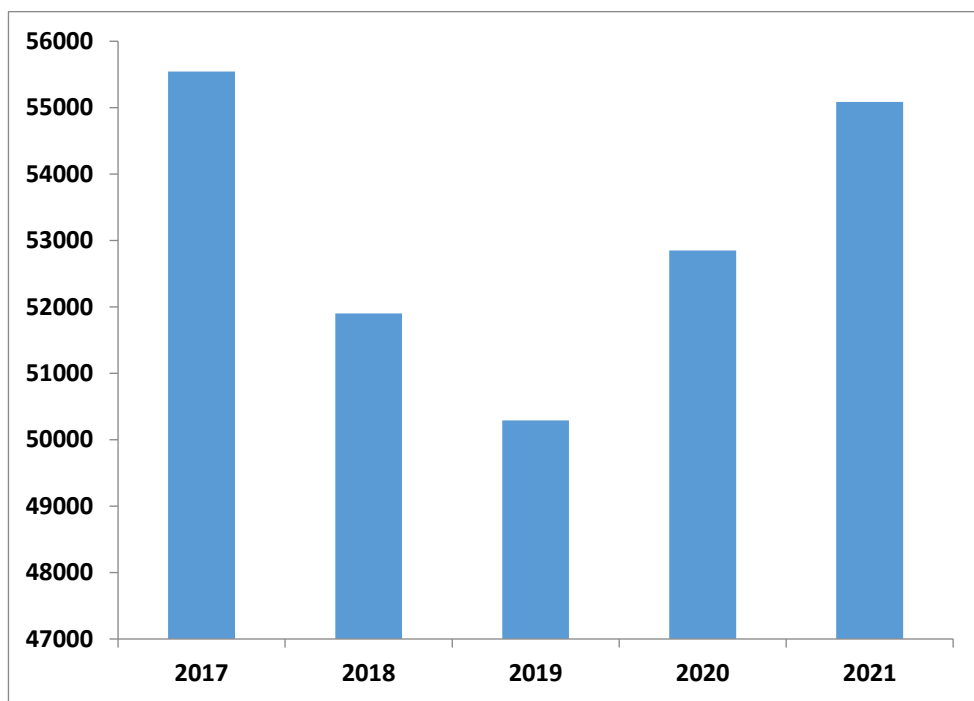
Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan program perlindungan sosial untuk penanggulangan kemiskinan yang dibagi dalam 4 periode yaitu:

- 1) program sebelum krisis 1997-1998 yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).
- 2) Program pasca reformasi pemerintah memberikan bantuan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Program tersebut diantaranya raskin (OPK), padat karya, bea siswa bagi murid dan sekolah. Beberapa program JPS seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menjadi cikal bakal program PNPM dalam periode berikutnya.

- 3) Program pasca krisis dan reformasi dimulai dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) digantikan dengan program bantuan sosial dan jaminan sosial. Program pasca reformasi membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- 4) Program setelah pandemi covid dilakukan melalui program sembako, subsidi iuran BPJS kelas 3, bantuan beras BULOG, diskon listrik, kuota internet, Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial tunai (BST), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), program Indonesia pintar (PIP), sembako, dan program keluarga harapan (PKH)(Carolina, 2022).

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan yaitu: timbulnya permasalahan sosial, seperti banyak pengangguran dengan skill rendah, banyak kejahatan akibat dari keterbatasan ekonomi yang memaksa masyarakat melakukan segala upaya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, tingginya disparitas antar daerah menjadi contoh dampak ketidakmerataan distribusi pendapatan sehingga terjadi kesenjangan sosial di masyarakat antara golongan kaya dan miskin(Ardito Bhinadi, 2017). Keluarga kaya di kota berusaha memberikan pendidikan yang relatif cukup terjamin jika dibandingkan dengan keluarga miskin yang berada di desa warga yang berasal dari pedesaan berpindah ke kota tanpa bekal pendidikan atau skill yang memadai untuk mencari pekerjaan, namun berakhir dengan tingkat produktivitas yang rendah dan menjadi buruh di sektor informal. Maka dari itu kemiskinan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi pada suatu Negara.

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi masalah utama mengingat Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya yang berarti perkembangan ekonomi Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju lain. Berbagai kebijakan dan strategi telah dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan yang memiliki dua karakteristik, yaitu langsung dan tidak langsung (Ratih et al., 2017). Perkembangan jumlah penduduk miskin Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

Sumber: BPS, diolah

Pada gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 55542.42 juta jiwa. Pada tahun 2018, Jumlah penduduk miskin

turun menjadi 51899.93 juta jiwa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan angka kemiskinan, seperti bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, pengendalian inflasi dan tingginya nilai tukar petani.

Penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia terendah terjadi pada tahun 2019 sebanyak 50289.73 juta jiwa. Jumlah ini merupakan perkembangan yang positif karena tingkat pengangguran dan inflasi relatif rendah menjadi keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka penduduk miskin.

Namun, kembali terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 52838.32 juta jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 55085.83 juta jiwa. Peningkatan tersebut merupakan pengaruh dari adanya COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan hampir di seluruh belahan dunia. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat dunia ternyata banyak mengubah tatanan hidup dan hubungan antar manusia. Di Indonesia, dampak Covid-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi dalam berbagai aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, ketersediaan pangan sulit dicapai akibat penutupan berbagai daerah atau penerapan program pembatasan sosial. Ketika akses akses pangan sulit, menyebabkan lebih banyak orang yang kelaparan, sehingga peningkatan angka penduduk miskin yang selama ini berusaha ditekan oleh pemerintah.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun sebelumnya juga dapat menjadi salah satu faktor penentu kemiskinan. Dijelaskan bahwa kebanyakan orang miskin berasal dari orang tua yang miskin. Namun, dalam beberapa kasus, orang

miskin bisa juga berasal dari orang tua kaya. Hal ini dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan, yaitu kemiskinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Putra, 2018). Lingkaran setan kemiskinan ini berarti bahwa yang miskin adalah mereka yang tingkat pendapatannya rendah. Akibat dari pendapatan yang rendah ini, pada akhirnya menyebabkan tingkat kesehatan yang buruk. Akibat kesehatan buruk, menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu menyebabkan rendahnya pendapatan karena kurangnya keterampilan atau kemampuan diri seseorang (Roziqin, 2017).

Melihat masih tingginya angka jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia masih tinggi, sangat diperlukan dukungan pemerintah guna mengatasinya. Peran pemerintah sangat penting guna upaya mengatasi kemiskinan melalui beberapa kebijakan, salah satunya menggunakan kebijakan fiskal. (Mankiw, 2003), terdapat dua instrumen penting dalam kebijakan fiskal yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik dan kecepatan pembangunan ekonomi yang diharapkan sesuai Rencana Pembangunan (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan pemerintah untuk memandu perekonomian suatu negara melalui pengeluaran (*spending*) dan pendapatan (*income*). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan perekonomian, menstabilkan suku bunga dan jumlah uang beredar.

Menurut (Dumairy, 1996). Fungsi pemerintah yaitu: (1). Fungsi alokasi ialah penyediaan barang pribadi, barang sosial, dan kombinasi barang sosial terpilih (2). Fungsi distribusi mengacu pada distribusi kekayaan, pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. (3). Fungsi stabilisasi adalah untuk menjaga angka pengangguran, harga atau inflasi agar tetap rendah serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasaran.

Pengeluaran pemerintah dapat dijadikan cerminan dari kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa dalam menunjang pelaksanaan program dapat mencerminkan alokasi yang dikeluarkan oleh negara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan (Melati, A.M. Sudrajat & Wilson, 2012).

Pemerintah bertugas agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah mengeluarkan anggaran belanja pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan pembangunan ialah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jika kebutuhan dasar terpenuhi maka kualitas sumber daya manusianya akan meningkat. Sumber daya dengan kualitas yang baik akan memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi sehingga tingkat efisiensi pun akan naik.

Jika perekonomian negara sedang berkembang pesat, maka pembangunannya negara itu juga akan mengalami kemajuan yang baik dari sarana prasarana, fasilitas umum, infrastruktur, dan lain sebagainya. Fasilitas tersebut tentu mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di negara berkembang. Diperlukan dana untuk

melaksanakan pembangunan negara dan menutupi kebutuhan negara. Pendapatan pemerintah dihasilkan dari pendapatan pemerintah yang kemudian digunakan kembali untuk keperluan pemerintah dalam membangun negaranya.

Pemerintah menggunakan dua strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan, pemerintah harus cermat dalam melakukan peningkatan dan menentukan urutan pengeluaran kemiskinan yaitu dimulai dari perawatan medis, bantuan tunai, bantuan makanan pokok, bantuan tempat tinggal, bantuan pekerjaan dan pelatihan, bantuan pendidikan dan bantuan kebutuhan energi(Rosen & Gayer, 2010).

Penyusunan berbagai program dan kegiatan merujuk pada sejumlah studi empirik berbasis bukti. Sifat kemiskinan yang multidimensional berarti bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan faktor sosial-ekonomi lain seperti tingkat dan kualitas pendidikan, kondisi kesehatan, dan jenis pekerjaan(Amin, 2021).

Pengeluaran pemerintah cukup berpotensi untuk upaya penurunan jumlah penduduk miskin negara tersebut. Gagasan di balik ini adalah semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka akan semakin tinggi tingkat ekonomi yang dapat dicapai. Faktanya, pengeluaran pemerintah adalah penggerak utama perekonomian. Ketika situasi kondisi ekonomi melambat akibat resesi, karena melemahnya

kemampuan ekonomi rakyat, situasi ekonomi dapat diselamatkan dengan menggunakan instrumen kebijakan guna meningkatkan anggaran negara. Anggaran pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi
(Milyar Rupiah)**

Tahun	Bidang Ekonomi (Milyar Rupiah)	Bidang Pendidikan (Milyar Rupiah)
2016	360226	370810.2
2017	310560	406102
2018	335464	431733.4
2019	389600	460316.8
2020	406175	473658.8
2021	511338	550005.6

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran bidang ekonomi jauh lebih besar daripada anggaran untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan ditujukan guna mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan guru honorer menjadi pegawai pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal dengan memanfaatkan pengeluaran pemerintah di berbagai bidang. Oleh karena itu, anggaran negara bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai bidang yang dikelola dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi bertujuan untuk membantu mendorong kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai cara, seperti adanya bantuan pemerintah untuk memutus perekonomian dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung berbagai kebijakan yaitu peningkatan ketahanan pangan dan energi, perluasan infrastruktur nasional secara berkelanjutan, pembangunan sarana infrastruktur publik, pengembangan teknologi dan pengetahuan.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dan mendasar dalam membangun kemampuan suatu negara untuk menghadapi kemajuan teknologi yang semakin modern dan mengembangkan keterampilan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006b). Meningkatkan anggaran pendidikan dapat meningkatkan produktivitas penduduk, mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas manusia. Inilah yang dikenal dengan investasi publik.

James Heckman, Ekonom peraih Nobel pada tahun 2000 menekankan pentingnya intervensi pendidikan pada kelompok usia dini yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan intervensi kepada kelompok usia dewasa.

Pada bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*), serta memperluas akses pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah kemiskinan antar generasi.

Setiap tahunnya anggaran yang pemerintah keluarkan pada bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan cenderung meningkat, jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum juga mengalami perubahan. Apakah dengan meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum dapat berpengaruh besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang, menunjukkan masalah yang akan dianalisis mengenai bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pendidikan dan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum terhadap kemiskinan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah tersebut, maka disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis: pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pendidikan dan jumlah penduduk miskin pada tahun sebelum terhadap kemiskinan Indonesia sebagai faktor penentu tingkat kemiskinan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan informasi bagi pengetahuan serta pandangan berkaitan dengan ilmu ekonomi khususnya bidang ilmu ekonomi keuangan daerah.

2. Hasil pada pembahasan dalam penelitian ini, dapat berkontribusi bagi pengembangan teori.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, agar dapat meningkatkan wawasan berkaitan dengan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan.
2. Dapat digunakan menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain dan sumber pengetahuan bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
3. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini dapat memberikan informasi pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi alokasi dana bagi kemajuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abilawa, M. S., & Amin, S. (2016). *Buku Daras Kemiskinan*. Dompot Dhuafa Publishing.
- Adhisasmita. (2005). *Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional: Indonesia 1992-2004*.
- Ali Khomsan, D. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Mengklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amin, K. H. M. (2021). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*.
<https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/05/19/strategi-penanggulangan-kemiskinan/>
- Ardito Bhinadi, 1973- (pengarang). (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat : studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Deepublish.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*. Unit penerbit dan percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). <https://www.bps.go.id/>
- Basuki, A. T. P. N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT Rajagrafindo Persada.
- Carolina, Ma. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, Dan Kesehatan, Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget*, 7, 165–180.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*.
- Girsang, W. (2011). *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba.
- Gujarati, D. N. dawn C. P. (2009). *Basic Econometric 5th Edition*. McGraw –Hill.
- Hartina, L., Irawan, E., & Permata, F. (2019). ~~济無~~No Title No Title No Title. *1*(01), 105–112.
- Hatta, M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Padabidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Ajatappareng. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 39.
<https://doi.org/10.31850/economos.v1i3.566>

- Juliandi A, Irfan, M. S. (2014). *NMetodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi.o Title*. UMSU Press.
- L, A., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Ekonika : Jurnal Ekonomi*, 7, 262–286. <https://doi.org/10.30737/ekonika.V7i2.2221>
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik Edisi Ke-3*. BPFE.
- Mangkoesebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik*. BPFE.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Erlangga.
- Manurung, P. R. & M. (2004). *Teori Ekonomi Makro*. LPFEUI.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2437>
- Melati, A.M. Sudrajat & Wilson, P. (2012). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesia Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.
- Nachrowi, N. D & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis dan Keuangan*. Lembaga PLPFE UI.
- Nurske, R. (1953). “*Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*.” Oxford Basis Blackwell.
- Omodero, C. O. (2019). Government sectoral expenditure and poverty alleviation in Nigeria. *Research in World Economy*, 10(1), 80–90. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n1p80>
- Putra, Z. (2018). Lingkaran Setan Kemiskinan. *Universitas Teuku Umar*. <http://utu.ac.id/posts/read/lingkaran-setan-kemiskinan>
- Ratih, G. A. P. A., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1(6), 29–54. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/24472/16623/>
- Rosen & Gayer, T. (2010). *Public Finance (9th ed.)*. The McGraw-Hill.
- Roziqin, M. M. (2017). Ini Lingkaran Setan kemiskinan. *BorneoNews.Co.Id*. <https://www.borneonews.co.id/berita/80621-ini-lingkaran-setan-kemiskinan>

- Sari, C. P. M., & Nurdin, M. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII, 18–23.
- Sudirman, I. . (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Kencana.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Todaro. (2006a). *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke-9*. Erlangga.
- Todaro, S. (2006b). *Economic Development, Seventh edition*.
- Wakhiri, N. M. Y. (2017). *Analisis Pendekatan Pada Model Regresi Data Panel Berganda*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Widarjono. (2013). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*. In Jakarta: Ekonosia.
- Widodo, A., & Johanna Maria, dan K. (2011). *PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH*.